

Judul : Pemerintah Lewati Masa Sulit, Politisi Senayan Kasih Jempol
Tanggal : Minggu, 22 Agustus 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Nilai Realisasi APBN 2020 Cukup Baik

Pemerintah Lewati Masa Sulit, Politisi Senayan Kasih Jempol

Senayan menilai, realisasi APBN 2020 cukup baik dan menjadi motor penggerak utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diharapkan, penyusunan alokasi belanja dan pengeluaran negara tahun ini lebih terukur.

ANGGOTA Komisi VII DPR Mercy Christy Barends mengatakan, perancangan anggaran terukur dimaksudkan agar setiap rupiah belanja negara dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sayangnya, hasil pemeriksaan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 menunjukkan, masih banyak permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan APBN.

"Fraksi PDI Perjuangan berpendapat agar pemerintah segera menindaklanjuti seluruh temuan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan, memastikan tidak terjadi lagi dalam APBN tahun-tahun berikutnya," katanya.

Sementara anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi menyadari tidak mudah bagi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2020 akibat pandemi Covid-19. Pemerintah bersama DPR dipaksa melakukan terobosan-terobosan yang tidak biasa dalam merespons situasi darurat ini.

"Dalam kondisi demikian, pelaksanaan APBN 2021 diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari merebaknya Covid-19 serta membawa rakyat Indonesia mampu melewati badai ini secara gotong royong dan bersama-sama," harapnya.

Terkait realisasi anggaran,

lanjut politisi Golkar ini, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPP 2020. WTP ini menunjukkan bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah karena mampu mempertahankan opini WTP lima tahun berturut-turut.

"Ini modal penting untuk mempertahankan optimisme dan kepercayaan publik bahwasanya pemerintah memiliki kapasitas dan integritas dalam membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit," katanya.

Selain itu, laporan BPK ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah telah berupaya keras agar APBN tetap optimal sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam merespons dampak pandemi. Walau demikian, Fraksi Golkar memberikan berbagai

catatan terhadap laporan BPK. Pertama, dari sisi laporan realisasi APBN. Data menunjukkan adanya selisih yang signifikan antara kebutuhan defisit anggaran dan realisasi pembiayaan melalui instrumen Surat Utang Negara. "Fraksi Golkar mengharapkan penjelasan lebih rinci terkait pengelolaan defisit dan pembiayaan pada APBN 2020," harapnya.

Kedua, dari sisi laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih atau SAL. Jika ditilik enam 6 tahun ke belakang, terjadi tren peningkatan SAL yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentasenya terhadap postur APBN. Pada tahun 2014, secara nominal SAL awal tercatat Rp 66,6 triliun atau 3,55 persen dari postur, lebih rendah dari 2020 sebesar 17,2 persen.

"Fraksi Golkar berharap mendapatkan penjelasan lebih rinci terhadap pengelolaan SAL da-

lam fungsinya sebagai bantalan fiskal dan alternatif sumber pembiayaan non utang," jelasnya.

Ketiga dari sisi neraca, adanya peningkatan aset merupakan hasil dari implementasi kebijakan penempatan uang negara pada bank umum mitra sebagai bantuan likuiditas perbankan. Fraksi Golkar berpandangan, bantuan likuiditas ini tetap dilanjutkan namun disertai dengan kemudahan penyaluran kredit dalam mengakselerasi PEN.

Terakhir, dari sisi catatan atas laporan keuangan. Fraksi Golkar berharap mendapat penjelasan komprehensif mengenai realisasi indikator ekonomi makro dan capaian-capaian yang di atas maupun di bawah target. "Berdasar pokok pikiran tersebut, Fraksi Golkar menyatakan menyetujui RUU atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2020 untuk dibahas lebih lanjut," tambah dia. ■ KAL